

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori Civic Education

Civic Education mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan zaman namun sebelum dikenal sebagai *Civic Education* dialog mengenai urgensi yang sama telah lama diperbincangkan bahkan pada masa Yunani kuno pada masa itu dikenal istilah *paideia* yang merujuk kepada Pendidikan yang tujuan ya membentuk individu agar menjadi warga negara yang baik dan beradab namun makna dari *paideia* sendiri memiliki arti yang lebih dalam dimana menurut bangsa Yunani pendidikann ini melibatkan proses pembentukan yang dalam serta berkelanjutan sepanjang hidup yang memiliki tujuan agar setiap individu nya bisa menjadi aset bagi teman-teman, keluarga serta yang paling penting negara, konsep *plebeia* ini juga tak terpisahkan dengan konsep *arete* yaitu keunggulan, kombinasi ini membentuk sebuah proses perkembangan yaitu perkembangan kewarganegaraan, dan seorang individu bisa megembangkan dirinya dalam politik dengan baik melalui partisipasi dalam kegiatan negara pendidikan harus dirancang untuk menghasilkan keinginan menjadi "warga negara sempurna".

Diskusi mengenai *civic education* ini telah banyak dilakukan hingga zaman modern ini namun salah satu pandangan teori *civic education* yang ingin peneliti sorot disini adalah pandangan dari John Dewey, ia memandang demokrasi sebagai suatu cara hidup ia pun berargumen bahwa semua anak berhak dan perlu Pendidikan demokratis, disaat para peserta didik berbagi kepentingan dengan orang lain yang akan mereka lakukan di sekolah, perbedaan seperti ras, kelas dan entitas

kemudian akan perlahan terkikis , dewey berpendapat bahwa minat serta pengalaman actual yang dirasakan peserta didik harus menjadi dasar untuk Pendidikan mereka.

John dewey berpendapat bahwa sejak abad ke-18 dan seterusnya, banyak negara yang mulai memandang Pendidikan sebagai sarana utama yang mereka bisa gunakan demi melanggengkan dan memulihkan kekuasaan politik mereka ia juga menyatakan bahwa “ pemeliharaan kedaulatan nasional tertentu itu menuntut pengarahan individu untuk kepentingan negara yang penting baik dalam pertahanan militer maupun dalam perjuangan supremasi internasional dalam hal perdagangan yang membentuk warga negara , bukan manusia menjadi tujuan Pendidikan, hal ini menunjukkan pergeseran fokus Pendidikan dari pengembangan individu menjadi pembentukan subjek yang patuh pada negara. menurut dewey Pendidikan mampu mencapai pengembanga pribadi dan interaksi yang penuh serta bebas dalam kelompok sosial dengan kata lain di negara demokratis ini kita mencari persiapan individu yang baik dan juga warga negara yang baik Pendidikan demokrasi dalam konteks ini adalah Pendidikan kewarganegaraan.

Tidak ada tempat yang lebih baik bagi Langkah politik atau demokrasi selain sekolah itu sendiri dimana para siswa memiliki komunitas nya sendiri, ini adalah persepsi dari dewey, dalam membentuk sebuah budaya demokratis di dalam sekolah tidak hanya memfasilitasi persiapan para siswa untuk partisipasi demokratis dalam sebuah sistem politik tetapi juga menumbuhkan lingkungan yang demokratis yang membentuk hubungan dengan orang yang dewasa dan diantara teman sebaya yang mereka sudah terlibat di dalam nya, kritik dari TheodoreSizer

seorang guru dan juga pendiri dari *Coalition Of Essential Schools* “ *students learns much more from the way a school is run* “ yang artinya para siswa akan lebih banyak belajar dari bagaimana cara sekolah berjalan, komentar lainnya adalah “ *and the best way to teach values is when the school is a living example of the values to be taught*” dan cara terbaik untuk mengajarkan nilai adalah disaat sekolah menjadi contoh nyata dari nilai yang akan diajarkan (Crittenden and Peter Levine 2007)

Menurut John Dewey (1935) demokrasi jauh melampaui dari sekedar kebebasan dalam bertindak, menurutnya demokrasi adalah kebebasan dalam kecerdasan atau intelektual (*freedom of intelligence*) maka dari itu komitmen dasar dari demokrasi sendiri haruslah membebaskan kecerdasan yang menurutnya lebih penting daripada kebebasan dalam bertindak semata, ciri-ciri dari kelompok demokratis adalah memiliki unsur-unsur *popular sovereignty* , *freedom* , *equality* , *individualism* and *social responsibility* yang dimaksud dengan *popular sovereignty* disini adalah memutuskan permasalahan yang didasarkan dari kesepakatan Bersama antara anggota kelompok, *freedom* yang dimaksud oleh Dewey disini sebagai kebebasan melakukan tindakan namun didasari kebebasan berpikir, dimana dalam melakukan kebebasan dalam bertindak seseorang itu harus memiliki kemampuan untuk berpikir dan berbicara secara bebas, dalam melakukan Tindakan demokratis yang cerdas ini dibutuhkan refleksi serta komunikasi, dan prinsip dari *equality* sendiri adalah kesetaraan dimana tidak ada anggota kelompok yang merasa dirinya lebih superior dibandingkan yang lainnya, setiap individu memiliki hak yang sama tanpa merasa diintimidasi, lalu *individualism* dan *social responsibility* disini yang dimaksud oleh Dewey secara fundamental berbeda dengan

egoism, individualism ini ditandai dengan pemikiran independen yang kuat namun juga diimbangi rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap masyarakat, karena ikatan antara individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan saling bertaut dan bergantung.

Keberlangsungan hidup serta kemajuan masyarakat sangat bergantung pada rasa tanggung jawab individu atas perilaku serta tindakannya, ini menuntut setiap individu agar berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dengan kreativitas nya, sebab partisipasi yang kreatif dan penuh tanggung jawab ini menandakan adanya kesadaran individu di masyarakat akan apa dampak dari berbagai ide serta tindakan mereka, hal ini demi menumbuhkan kesadaran bahwa setiap kemandirian berpikir tiap individu ini harus diiringi dengan pemahaman akan bagaimana implikasi sosial nya dari pemikiran serta Tindakan individu tersebut, dan ini akan menstimulasi kontribusi yang positif bagi masyarakat.

Menurut John Dewey, ada hubungan yang sangat erat antara pendidikan dan demokrasi; keduanya tak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Pendidikan demokrasi adalah usaha sadar untuk membentuk kemampuan warga negara agar bisa berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi aktif rakyat yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintahan semacam ini adalah pemerintahan yang demokratis, di mana kedekatan dengan rakyat menjadi perekat bangsa. Pentingnya pendidikan demokrasi juga terlihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai demokrasi diyakini akan membawa kehidupan berbangsa dan

bernegara yang lebih baik dalam semangat egalitarian dibandingkan ideologi non-demokrasi. Masyarakat demokratis menolak prinsip otoritas eksternal. Sebagai gantinya, mereka harus menemukan landasan dalam disposisi dan minat sukarela warga negaranya, dan ini hanya bisa dibentuk melalui pendidikan. Namun, ada penjelasan yang lebih mendalam. Demokrasi bukan sekadar bentuk pemerintahan; ia adalah cara hidup yang saling terkait, sebuah pengalaman yang dikomunikasikan bersama. (Sunarto 2016)

Dewey dalam bukunya yang berjudul *Democracy and Education* yang mengawali karyanya yang dikenal monumental mengenai hubungan timbal balik antara demokrasi dan Pendidikan dengan sebuah klaim yang fundamental yaitu manusia tidak dapat mengabaikan Pendidikan tanpa mengancam kelangsungan hidup spesies mereka sebab keberlanjutan ras manusia bergantung pada upaya kita untuk memelihara dan melestarikan Pendidikan manusia. Dalam perkataannya sendiri,

Dewey menyatakan: “*What nutrition and reproduction are to physiological life, education is to social life*”(Dewey 1930), begitulah pendidikan bagi kehidupan sosial. Bagi Dewey, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kapasitas penuhnya dengan mengubah apa yang ia sebut sebagai 'disposisi ketidakdewasaan'. Namun ini bukan hanya tanggung jawab individu saja akan tetapi juga tanggung jawab sosial. Pertumbuhan menuju kematangan, oleh karena itu, adalah hasil dari keterlibatan dinamis antara individu dan masyarakat. Keterlibatan ini, menurut Dewey, terjadi melalui suatu lingkungan. Lingkungan

bukan sekedar konteks yang diperlukan agar pendidikan berlangsung. Faktanya, kegagalan dalam pendidikan diukur dari kemampuan seseorang untuk mengendalikan lingkungan tempat pendidikan itu terjadi. Oleh karena itu, pendidikan yang sesungguhnya tidak terjadi dengan cara menanamkan keinginan dan ide-ide tertentu secara langsung, pun bukan sekedar membentuk kebiasaan tindakan yang bersifat murni fisik.

Dewey menjelaskan bahwa lingkungan terdiri dari kondisi-kondisi yang mempromosikan atau menghambat, menstimulasi atau menghalangi aktivitas-aktivitas khas dari suatu makhluk hidup. lingkungan bukan sekedar konteks yang diperlukan untuk pendidikan. Justru, kegagalan dalam pendidikan diukur dari kemampuan seseorang untuk mengendalikan lingkungan tempat pendidikan itu berlangsung. Oleh karena itu, pendidikan yang sesungguhnya tidak terjadi dengan cara menanamkan keinginan dan ide-ide tertentu secara langsung, juga bukan sekedar membentuk kebiasaan fisik semata. Lebih buruk lagi, jika pendidikan berlangsung melalui pemaksaan, cara-cara penindasan, dan pembebanan otoritas, yang berarti keunggulan dan kualifikasi bukanlah yang utama. Pada akhirnya, lingkungan atau medium lah yang lebih diutamakan dalam proses pendidikan.

Boyd H. Bode (1935) berpendapat bahwa demokrasi membutuhkan pendidikan di sekolah agar dapat menyadari dirinya sendiri. Namun, Bode bukanlah pemikir modern pertama di bidang pendidikan yang bersikeras akan hal ini. John Dewey, pada awal abad ke-20, telah menyebarkan gagasan bahwa sekolah memainkan peran kunci dalam internalisasi nilai-nilai demokratis.

Dewey menunjukkan bahwa sekolah memenuhi berbagai fungsi:

1. Menyediakan Lingkungan yang Disederhanakan: Dalam masyarakat, terdapat banyak informasi, nilai, doktrin, pengetahuan, dan lain-lain yang tersedia secara acak dan mendadak. Dewey menjelaskan bahwa sekolah berfungsi untuk memilih fitur-fitur yang cukup mendasar dan dapat direspons oleh kaum muda. Dengan cara ini, sekolah memiliki kapasitas untuk menentukan apa yang relevan untuk diturunkan kepada siswa.
2. Menghilangkan Pengaruh yang Tidak Sesuai: Sekolah bertujuan untuk menghilangkan fitur-fitur yang tidak sesuai dari pengaruh-pengaruh yang masih ada dari berbagai lingkungan. Dewey menunjukkan kapasitas penting setiap sekolah sebagai lokasi transformasi. Sebuah sekolah tidak dapat berfungsi sepenuhnya hanya dengan fungsi memilah dan menyebarkan informasi, karena ia mengemban tanggung jawab untuk mengubah siswa menjadi lebih baik.
3. Menyediakan Lingkungan yang Lebih Luas: Terakhir, sekolah menyediakan 'lingkungan yang lebih luas' dan memastikan semua siswa memiliki paparan yang cukup terhadapnya. Perluasan lingkungan seseorang ini memungkinkan setiap siswa untuk melihat melampaui dunianya yang tunggal sebagai satu-satunya dunia yang mungkin ada. Selain itu, sekolah juga membantu setiap siswa untuk mempertimbangkan keberagaman dengan cara yang sehat, optimis, dan percaya diri, daripada menganggapnya sebagai ancaman atau, lebih buruk lagi, memandangnya dengan permusuhan dan kebencian. Fungsi sekolah yang terakhir ini sangat penting dalam konteks modern di mana kita harus hidup dalam masyarakat yang heterogen.

Oleh karena itu, pendidikan yang sesungguhnya tidak terjadi dengan cara menanamkan keinginan dan ide-ide tertentu secara langsung, pun bukan sekadar membentuk kebiasaan tindakan yang bersifat murni fisik. Berikut adalah karakteristik Pendidikan yang akan mendukung pertumbuhan warga negara yang dewasa:

1. Pendidikan Non-Koersif: Membangun Tanggung Jawab Moral

John Dewey menyadari bahwa pendekatan koersif (pemaksaan) bisa sangat efektif untuk mendapatkan kepatuhan dari siswa. Namun, memaksa seseorang untuk mematuhi hukum bukanlah cara ideal untuk mempromosikan tindakan moral. Sebaliknya, cara terbaik untuk menumbuhkan tanggung jawab moral adalah dengan menarik disposisi (kecenderungan alami) untuk bertindak secara moral. Hal ini karena pemaksaan didasarkan pada rasa takut, sedangkan pendekatan yang menarik disposisi moral menghormati kebebasan manusia. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan pada penanaman disposisi moral.

2. Pendidikan sebagai Proses Abadi

Dewey sangat menekankan bahwa pendidikan bukanlah proses yang statis, terpaku, tidak dapat dipecahkan, atau memiliki tujuan abstrak yang harus dicapai siswa setelah upaya besar dan keras. Pandangan seperti itu merupakan kesalahpahaman mendalam tentang tujuan pendidikan. Sebaliknya, pendidikan adalah proses yang konstan yang dicirikan oleh reorganisasi, rekonstruksi, dan transformasi pengalaman yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan tidak berakhir ketika seseorang

lulus dari suatu institusi akademik. Justru, pendidikan adalah urusan seumur hidup. Semakin intensif dan kritis seseorang terlibat dengan masyarakatnya, semakin hidup dan dinamis pula pendidikannya.

3. Pendidikan Menuju Warga Negara Kritis dan Anti-Konformitas

Tema utama dan berulang dalam filosofi pendidikan Dewey adalah pendidikan yang mengarah pada warga negara kritis dan menentang konformitas. Dimensi imperatif masyarakat dalam filosofi pendidikan Dewey tidak mengimplikasikan bentuk penyerahan diri dari individu untuk mencapai keberadaan yang bermartabat. Sebaliknya, masyarakat harus menghargai keunikan individu dan tidak pernah menjadi ancaman baginya. Setiap individu memiliki keberadaan yang unik, yang sesuai dengan kontribusi uniknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Keunikan ini, pada akhirnya, diekspresikan dalam kapasitas seseorang sebagai warga negara yang kritis. Dewey menyatakan bahwa setiap warga negara harus memiliki kemampuan untuk menilai manusia dan kebijakan dengan bijaksana serta mengambil peran yang menentukan dalam membuat dan mematuhi hukum. Oleh karena itu, untuk membangun masyarakat yang benar-benar demokratis, kritik itu perlu dan tidak boleh dicela sebagai suara yang berbeda yang bertujuan untuk menggoyahkan masyarakat. Sebaliknya, kritik justru menjamin masyarakat yang lebih hidup dan dinamis.

Menurut John Dewey, lingkungan sosial adalah inti dari segala hal. Ini berarti bahwa semua pengetahuan yang ada, yang menjadi fokus pendidikan, terbentuk di dalamnya. Dewey menjelaskan bahwa kita hidup dikelilingi oleh orang lain dan berbagai hal yang merupakan hasil dari pengalaman manusia sebelumnya. Gabungan dari pengalaman-pengalaman inilah yang kemudian membentuk pengetahuan yang kita pahami. Sifat sosial manusia sangat krusial bagi pendidikan. Seperti yang diungkapkan Dewey (1938), "Prinsip bahwa pengembangan pengalaman terjadi melalui interaksi berarti pendidikan pada dasarnya adalah proses sosial" (hlm. 58). Ironisnya, seringkali pendidikan tradisional gagal memahami betapa berharganya sifat sosial siswa ini. Dewey mengkritik pendidikan tradisional yang memiliki "pola organisasi" kaku, meliputi jadwal, aturan, dan prosedur, yang justru menghambat proses belajar siswa. Sebaliknya, Pendidikan Progresif yang digagas Dewey sangat menganjurkan peningkatan interaksi sosial di sekolah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang untuk memupuk hubungan sosial. Hubungan-hubungan ini tidak hanya meningkatkan interaksi di antara siswa, tetapi juga dapat memfasilitasi interaksi yang lebih berarti antara individu yang lebih dewasa dan yang belum dewasa. (Roberts 2003)

Dewey meyakini adanya potensi yang luar biasa dalam Pendidikan saat Pendidikan diperlakukan sebagai pengembangan kecerdasan, dari kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam pengalaman sehari-hari, oleh karena itu ia merasa yakin bahwa dalam Pendidikan demi tercapainya tujuan yang baik untuk individu ataupun masyarakat harus berlandaskan pada pengalaman hidup yang nyata setiap

orang menurutnya bahwa sekolah yang progresif tidak dapat bergantung pada tradisi yang sudah mapan dan kebiasaan institusional namun ia harus beroperasi secara acak atau diarahkan pada ide-ide yang jika kemudian diartikulasikan dan dibuat koheren membentuk sebuah filosofi pendidikan yang kuat (Dewey 1986)

Pandangan Dewey terhadap pendidikan tradisional adalah bahwa pengetahuan terdiri dari kumpulan informasi dan keterampilan yang telah dikembangkan di masa lalu. Peran sekolah adalah untuk mewariskan pengetahuan ini kepada anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan tradisional memaksakan pendidikan dari atas dan dari luar. Salah satu metodenya adalah belajar dengan mengakuisisi dari apa yang ada di dalam buku. Pengalaman hidup siswa dianggap tidak relevan untuk pemerolehan pengetahuan. Jadi, dalam pendidikan tradisional, pengetahuan adalah sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya dan dikendalikan di luar pengaruh siswa. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin untuk mempersiapkan mereka menghadapi usaha di masa depan menempatkan siswa ke dalam situasi kehidupan nyata memungkinkan mereka untuk belajar dari pengalaman mereka dan memperoleh pengetahuan yang dapat mereka terapkan nanti dalam berbagai situasi. Dengan demikian, keterampilan dasar yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang produktif (seperti membaca, menulis, dan berhitung) paling baik disajikan dalam konteks pengalaman, berbeda dengan pelajaran yang berdiri sendiri.

Dewey dengan jelas menganjurkan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Namun, ia berpendapat bahwa tidak semua pengalaman bersifat

mendidik. Ia menggunakan istilah "mis-educative" (pengalaman yang salah didik) untuk menggambarkan pengalaman yang justru menghambat atau memutarbalikkan pembelajaran di masa depan. Posisinya adalah, "segalanya bergantung pada kualitas pengalaman yang dimiliki" (Dewey, 1938, hlm. 27). Agar pengalaman bersifat mendidik, pengalaman tersebut harus mengarah ke dunia nyata. Dengan demikian, pengalaman mengarah pada kemampuan untuk mentransfer pengetahuan ke situasi baru.

Teori civic education dewey ini memiliki hubungan yang erat sebab menurut dewey Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sekedar menghafal fakta-fakta tentang pemerintahan ataupun hukum namun menurut dewey ia adalah proses pengembangan individu yang di masa depan mampu berpartisipasi secara cerdas dan efektif dalam kehidupan demokratis dewey menempatkan pembelajaran yang berbasis pengalaman dalam pembelajaran kewarganegaraan itu penting sebab para siswa akan terlibat secara aktif dalam sebuah contoh permasalahan yang nyata tengah terjadi dan aspek lain yang dirasa penting oleh dewey dalam proses belajar adalah interaksi yang berlangsung selama pembelajaran bab ini akan mengasah kemampuan kewarganegaraan nya yaitu kolaborasi, komunikasi dan negosiasi, pemecahan masalah dan berpikir kritis, keterkaitan kurikulum dengan kehidupan nyata, mempersiapkan partisipasi demokratis hal tersebut merupakan tujuan dari civic education dan *Project Citizen* merupakan implementasi yang nyata terhadap civic education dewey karena *Project Citizen* merupakan sebuah instructional treatment dalam mengajarkan kewarganegaraan yang dirancang untuk melibatkan siswa dalam proses nya secara nyata, dimana para siswa merupakan instrumen

utama dalam metode ini, dan mereka akan disuguhkan sebuah masalah untuk mengasah karakter demokratis dengan berbagai diskusi, bagaimana berargumentasi, toleransi, dan membangun rasa tanggung jawab

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Penelitian Terdahulu di wilayah Internasional

Studi pertama yang komprehensif pertama kali dilakukan oleh (Tolo, K.W, 1998) mengenai *Project Citizen* dan implementasi nya di seluruh amerika serikat, ia menggunakan survey untuk mengumpulkan informasi dari 381 siswa dalam 21 kelas *Project Citizen* dan ia percaya bahwa itu bisa membantu mereka mempelajari informasi dan kecakapan yang berharga, meskipun penelitian yang dilakukan oleh tolo menambah pandangan dalam melihat efek dari *Project Citizen* dalam pengembangan kewarganegaraan di siswa dan ur yang menggunakan program tersebut namun dalam penelitian yang tolo lakukan ini kita tidak bisa melihat dengan jelas perbedaan antara yang menggunakan *Project Citizen* dan tidak (soule, n.d.) memeriksa efek dari *Project Citizen* dalam pengembangan kewarganegaraan siswa di bosnia dan herzegovina di mei tahun 1999 sebanyak 1,999 murid di survey diperkirakan setengah nya telah berpartisipasi dalam project project, dan setengah nya lagi belum menggunakan kelompok pembanding yang sama, ia menemukan bahwa partisipasi dalam *Project Citizen* memiliki perkembangan yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan dan pengetahuan politik, sikap politik yang mendukung demokrasi partisipatif, serta nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti program mengalami perkembangan positif dalam tiga

aspek utama yang diukur, yaitu:Kemampuan dan wawasan politik,Orientasi serta sikap politik, dan Nilai-nilai yang memperkuat komitmen terhadap demokrasi.

Namun, kesimpulan dari penelitian ini harus dianalisis secara lebih kritis. Terdapat kemungkinan bahwa sebelum mengikuti *Project Citizen* , siswa dalam kelompok perlakuan sudah memiliki perbedaan dalam keterampilan, sikap, dan nilai- nilai politik dibandingkan dengan kelompok pembanding. Sayangnya, perbedaan awal ini tidak diperhitungkan dalam analisis, sehingga temuan studi ini memerlukan interpretasi yang lebih hati-hati.

Vontz, Metcalf, dan Patrick (2000) mengevaluasi efektivitas *Project Citizen* dengan menggunakan desain quasi-eksperimental pre-test/post-test. Studi ini melibatkan 102 kelas (51 kelompok perlakuan dan 51 kelompok pembanding) serta 1.412 siswa (712 dalam kelompok perlakuan dan 700 dalam kelompok pembanding) yang tersebar di tiga wilayah politik: Indiana (Amerika Serikat), Latvia, dan Lithuania.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Project Citizen* memberikan dampak positif dan signifikan terhadap perkembangan kewarganegaraan siswa. Secara spesifik, setelah memperhitungkan perbedaan awal pada pre-test, siswa yang berpartisipasi dalam program ini mengalami peningkatan yang signifikan secara statistik dalam aspek berikut: Pengetahuan kewarganegaraan, Keterampilan kewarganegaraan, serta, Kecenderungan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Liou (2002) merupakan studi pertama yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas *Project Citizen*

, mengidentifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta menggali perspektif guru dan siswa mengenai program ini di sebuah kota kecil di wilayah Midwest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dan siswa memiliki pandangan positif terhadap *Project Citizen* , yang mendukung temuan sebelumnya dari Tolo (1998). Temuan penting lainnya adalah bahwa *Project Citizen* memberikan dampak positif terhadap pemahaman kewarganegaraan, keterampilan, serta sikap siswa, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian sebelumnya (Tolo, 1998; Soule, 2000; Vontz et al., 2000). Selain itu, program ini juga terbukti berkontribusi terhadap pengembangan aspek psikologis siswa, seperti kepercayaan diri dalam bertindak (*self-efficacy*) dan kemampuan mengatur diri sendiri (*self-regulation*).

Meskipun *Project Citizen* dianggap oleh guru dan sebagian besar siswa sebagai metode yang efektif dalam pendidikan kewarganegaraan, terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya. Faktor-faktor yang menghambat penerapan program ini meliputi beban kerja guru yang tinggi, tantangan dalam mengelola kelas, serta kebutuhan akan pelatihan khusus bagi guru. Namun demikian, meskipun penelitian Liou menunjukkan dampak positif dari *Project Citizen* , penting untuk dicatat bahwa studi ini hanya dilakukan pada sekelompok siswa berbakat dalam satu kelas tertentu. Oleh karena itu, cakupan generalisasi temuan ini masih terbatas.

Dan penelitian yang dilakukan oleh (Liou, n.d.) ia melakukan penelitian kepada murid senior di sekolah menengah atas di Taiwan. Selain meningkatkan keterampilan kewarganegaraan, *Project Citizen* juga terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap dua aspek utama dalam sikap

kewarganegaraan

menggali perspektif guru dan siswa mengenai program ini di sebuah kota kecil di wilayah Midwest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dan siswa memiliki pandangan positif terhadap *Project Citizen*, yang mendukung temuan sebelumnya dari Tolo (1998). Temuan penting lainnya adalah bahwa *Project Citizen* memberikan dampak positif terhadap pemahaman kewarganegaraan, keterampilan, serta sikap siswa, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian sebelumnya (Tolo, 1998; Soule, 2000; Vontz et al., 2000). Selain itu, program ini juga terbukti berkontribusi terhadap pengembangan aspek psikologis siswa, seperti kepercayaan diri dalam bertindak (*self-efficacy*) dan kemampuan mengatur diri sendiri (*self-regulation*).

Meskipun *Project Citizen* dianggap oleh guru dan sebagian besar siswa sebagai metode yang efektif dalam pendidikan kewarganegaraan, terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya. Faktor-faktor yang menghambat penerapan program ini meliputi beban kerja guru yang tinggi, tantangan dalam mengelola kelas, serta kebutuhan akan pelatihan khusus bagi guru. Namun demikian, meskipun penelitian Liou menunjukkan dampak positif dari *Project Citizen*, penting untuk dicatat bahwa studi ini hanya dilakukan pada sekelompok siswa berbakat dalam satu kelas tertentu. Oleh karena itu, cakupan generalisasi temuan ini masih terbatas.

Dan penelitian yang dilakukan oleh (Liou, n.d.) ia melakukan penelitian kepada murid senior di sekolah menengah atas di Taiwan. Selain meningkatkan keterampilan kewarganegaraan, *Project Citizen* juga terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap dua aspek utama dalam sikap kewarganegaraan siswa sekolah menengah atas di Taiwan, yaitu minat terhadap

politik serta komitmen terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *Project Citizen* bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan remaja agar dapat menggunakan hak-hak kewarganegaraan mereka sekaligus memenuhi tanggung jawab mereka dalam sistem demokrasi.

Dengan demikian, temuan mengenai pengaruh positif yang signifikan dari *Project Citizen* terhadap minat politik serta komitmen siswa terhadap hak dan kewajiban kewarganegaraan merupakan hasil yang sejalan dengan tujuan utama dari program ini. Berbeda dengan temuan signifikan terkait minat politik dan komitmen terhadap hak serta kewajiban kewarganegaraan, *Project Citizen* tidak menunjukkan pengaruh positif yang signifikan pada dua aspek lainnya, yaitu kecenderungan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di masa depan dan rasa efektivitas politik (*political efficacy*).

2.2.2 Penelitian Terdahulu di Wilayah Lokal

Penelitian yang dilakukan oleh (Manik & Dharma, 2024) ia melakukan penelitian ke siswa sma kelas 11 di sma negeri 7 binjai, kesimpulan dalam penelitian ini bahwa terdapat peningkatan yang signifikan kepada siswa setelah dilakukan *Project Citizen* dalam meningkatkan civic disposition, dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecakapan kewarganegaraan, kecakapan partisipatoris, sebab pendidikan kewarganegaraan diperlukan dalam membentuk kepribadian siswa untuk menjadi warga negara yang baik. yang dilakukan dengan pre test, pembelajaran yang dilakukan menerapkan model *Project Citizen* , dan ditemukan peningkatan dalam civic disposition setelah dilakukan model *Project Citizen* , lalu untuk pembandingan dilakukan model *problem based learning* dan hasil-

nya penggunaan model *Project Citizen* memberikan peningkatan yang signifikan dibanding penggunaan model *problem based learning*.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh (Mulyoto & Samsuri, 2017) yang meneliti terhadap penguasaan kompetensi kewarganegaraan dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di SMP Negeri 5 Yogyakarta, dalam penelitian ini digunakan pretest dan posttest dan disimpulkan bahwa siswa yang menjadi kelompok eksperimen *Project Citizen* dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran nya memberikan respon yang positif karena adanya perkembangan yang signifikan, karena guru dapat merangsang para murid nya untuk bisa berpikir kritis analitis dan reflektif dan berpikiran terbuka, yang memungkinkan para murid bisa meningkatkan penguasaan nya dalam kompetisi kewarganegaraan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Norlaili Hidayati, 2017) untuk meningkatkan kecakapan intelektual dan partisipasi siswa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan meningkatkan kecakapan kewarganegaraan berbasis *Project Citizen* , dalam penelitian berharap dengan penerapan *Project Citizen* siswa bisa memecahkan masalah yang riil dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara , para siswa akan belajar menemukan alternatif pemecahan masalah, mengembangkan usul kebijakan public dan juga rencana tindakan , eksperimen ini menggunakan kuasi eksperimen yang melibatkan siswa kelas XI SMK YPT Banjarmasin, dan hasil dari penelitian ini adalah para siswa yang dilakukan kelas eksperimen *Project Citizen* memiliki perkembangan kecakapan yang positif dari kelas konvensional, hasil ini terlihat dari hasil pre-test serta post-test yang dilakukan peneliti, pemberlakuan *Project Citizen*

ini meningkatkan kecakapan kewarganegaraan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tin Sumartini SMP NEGERI, 2016) pembelajaran yang berbasis *Project Citizen* terbukti lebih baik terhadap perkembangan kompetensi warga negara global dimana siswa lebih aktif dalam berpendapat dan pembelajaran yang demokratis bisa dicapai dengan penerapan *Project Citizen* ini, dalam penelitian ini juga menunjukkan para siswa yang di kelas eksperimen menunjukkan adanya perkembangan pengetahuan warga negara yang sesuai dengan pembelajaran konstruktivisme dimana para siswa diajak untuk aktif untuk bisa membangun sebuah gagasan atau konsep baru penerapan *Project Citizen* ini juga memberikan pengaruh yang positif terhadap pengembangan watak warga negara, dan hasil penelitian ini selaras dengan pendapat budimansyah dan suryadi (2008) bahwa tujuan *Project Citizen* ini untuk membantu para siswa bisa memahami masalah yang ada di masyarakat ,serta membantu mengembangkan kecakapan warga negara yang dibutuhkan bagi warga negara demokrasi,juga mendorong partisipasi yang bertanggung jawab dan juga efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kristinawati, 2019) *Project Citizen* digunakan untuk melihat pengaruh nya terhadap prestasi siswa dan minat belajar dan berpikir kritis, dalam penelitian yang dilakukan ini menghasilkan bahwa *Project Citizen* tidak ada pengaruh *Project Citizen* dalam pembelajaran yang dilakukan oleh para siswa yang dijadikan kelas uji, karena ada banyak faktor yang mendukung proses pembelajaran bisa optimal.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



2.4 Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh positif *Project Citizen* terhadap sikap demokratis santri

H0 : Tidak terdapat pengaruh *Project Citizen* terhadap sikap demokratis santri